



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DEARAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara

BUPATI MULIYADI	WAKIL BUPATI KANTOR	ASAS	SEKDA	WABUP

Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6804	DINAS IBADAH KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
------	---------------------	--------	-------	-------




7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tandatanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

11. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.
19. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
21. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
22. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online dilingkungan Pemerintah Daerah.
23. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip :

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Pengaturan SPBE bertujuan:

- a menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya;
- c terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a pengelolaan SPBE;
- b manajemen SPBE;
- c audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d penyelenggara SPBE;
- e percepatan SPBE;
- f pemantauan dan evaluasi SPBE;
- g pengelolaan nama domain dan sub domain;
- h pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- i partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan
- j pembiayaan.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUR
				

BAB II
PENGELOLAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5





- (1) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Induk SPBE,
 - b. arsitektur SPBE,
 - c. peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses Bisnis;
 - f. data dan Informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berpedoman pada rencana induk SPBE nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WADUP
				

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Review Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d perubahan RPJMD.
- (7) Review Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan Oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 10





- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

K. BAG HUKUM	DINASIGADAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 12

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegasi.

Pasal 13

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi antar Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

KABAG HUKUM	DINASIBADANI KANTOR	ASSIJ	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - b sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a perangkat keras;
 - b pusat data;
 - c *disaster recovery centre*;
 - d perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari:
 - a *server*,
 - b komputer;
 - c *router* dan *switch*;
 - d *Unit Power Suplay* (UPS);

KUBAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ABS III	SEKDA	WACUP
				

- e media koneksi jaringan;
 - f ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
- a mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur SPBE;
 - b mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Pemerintah Daerah; dan
 - c mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan setiap Perangkat Daerah.
- (4) *Disaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

Pasal 18

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Aplikasi dan website SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a aplikasi umum; dan
 - b aplikasi khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah

KABAG HUKUM	DINAS/DAWAH KANTOR	AS III	SEKDA	WADUP
				

dan dikelola oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi.

- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup:
 - a penjaminan kerahasiaan;
 - b penjaminan keutuhan;
 - c penjaminan ketersediaan;
 - d penjaminan keaslian; dan
 - e penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*), terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan data pemeliharaan.

KABUPATEN	DINAS	SEKDA	WABUP

- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b layanan publik berbasis elektronik.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a perencanaan;
 - b penganggaran;

KORWAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

- c keuangan;
 - d pengadaan barang dan jasa;
 - e kepegawaian;
 - f kearsipan;
 - g pengelolaan barang milik negara;
 - h pengawasan;
 - i akuntabilitas kinerja, dan
 - j layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
- a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
 - o. Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
 - p. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- q. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Pasal 27

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan SPBE.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengatur seluruh penyelenggaraan SPBE yang harus ditaati oleh setiap Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan inovasi penyelenggaraan SPBE selama masih sesuai dengan Arsitektur SPBE dan terkait pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengembangan penyelenggaraan SPBE.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WADUP
				

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 28





- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a audit Infrastruktur SPBE;
 - b audit Aplikasi SPBE; dan
 - c audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a audit Aplikasi Umum; dan
 - b audit Aplikasi Khusus.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WADUP
				

- (2) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V




PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pengelolaan SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Daerah.
- (3) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
- (5) Koordinator SPBE di Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PERCEPATAN SPBE

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ABS	SEKDA	WADUP
				

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE di Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara menyeluruh dan berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE di Daerah dan koordinator Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pedoman evaluasi SPBE dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN SUB DOMAIN

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Nama Domain dan subdomain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah.
- (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Nama Domain dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama sub domain dengan Nama Domain sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a teguran lisan;
 - b teguran tertulis; dan/ atau
 - c sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. BAG H. KUM	DINASIBDAN KAM	ASS	SEKOA	WADUP

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Nama Domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 36





Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - c penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi dan pengawasan umum oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a pemanfaatan SPBE,
 - b Aplikasi website, dan
 - c data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KABAG. HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 39

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan startegis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS J	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- b sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal **11 Desember** 2023

Pj, BUPATI BOALEMO

SHERMAN MORIDU,

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal **11 DESEMBER** 2023

Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SUPANDRA NUR

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR **6**)

NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO : **6/29/2023**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan maupun kinerja yang telah dilakukan, sekaligus juga memberikan pemenuhan terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses informasi terkait tata kelola pemerintahan.

Di era digitilisasi saat ini, telah menimbulkan perubahan yang cukup besar dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pesatnya arus informasi dalam kehidupan masyarakat dan juga lahirnya berbagai media yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan layanan publik dan pembangunan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan SPBE ini berkaitan dengan pelayanan publik dan non pelayanan publik. Dengan memaksimalkan komponen SPBE diantaranya adalah dengan perencanaan, kelembagaan, kebijakan, sistem informasi dan infrastruktur SPBE. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, dapat mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

KABUPATEN BOALEMO	DINAS/BADAN KANTOR	ASEK	SEKDA	WABUP
				

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesinambungan” adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

KABAG HUKUM	DINASBADAN KAMTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	AS (1)	SEKDA	WASUP
				

Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6....

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	5	7	